

Peningkatan Resiliensi Badan Usaha Milik Desa Merespons Dampak Pandemi COVID-19

Bambang Hidayana, Pande Made Kutaneegara, Muhammad Zamzam Fauzanafi, Angie Purbawisesa, Rakryan W D Ulhaq

Fakultas Ilmu Budaya, Universitas Gadjah Mada
Korespondensi: bambang.hidayana@ugm.ac.id

Abstract

The COVID-19 pandemic has impacted the decline in tourism activities, both those managed by companies, individuals, villages, and Village-Owned Enterprises (BUMDes). The decline in tourism activities has had a secondary impact on small-scale businesses related to the tourism sector. The heavy dependence on the tourism sector and limited other business opportunities have hit the tourism industry's economy hard. Therefore, efforts are needed to enable them to survive and rise from the downturn in these activities. As one of the institutions that carry the Tri Darma of Higher Education, the campus world should have moved to carry out community service dharma. With community service, empowerment programs can be carried out for BUMDes and these business actors to increase resilience. The empowerment program is carried out as (1) workshop facilitation support and discussions with BUMDes managers and business actors in mapping problems and (2) formulating an action plan to reduce the impact and economic recovery of the COVID-19 pandemic. This empowerment program succeeded in mapping out problems and action plans to increase economic resilience during a pandemic and economic recovery through developing multiple economic businesses, such as preserving the tourism business while advancing farming, animal husbandry, mushroom cultivation, and herbal home industries.

Keywords: *BUMDes; community empowerment; pandemic; rural economy*

Abstrak

Pandemi COVID-19 telah berdampak pada merosotnya aktivitas pariwisata, baik yang dikelola oleh perusahaan, perorangan, desa, dan juga Badan Usaha Milik Desa (BUMDes). Kemerosotan kegiatan pariwisata membawa dampak ikutan terhadap usaha skala kecil yang terkait dengan sektor pariwisata. Ketergantungan yang besar terhadap sektor pariwisata dan keterbatasan peluang usaha lain telah memukul perekonomian pelaku wisata secara telak. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang memungkinkan mereka tetap *survive* dan bangkit dari keterpurukan aktivitas tersebut. Dunia kampus sebagai salah satu institusi yang mengusung Tri Darma Perguruan tinggi sudah semestinya bergerak untuk melakukan darma pengabdian kepada masyarakat. Dengan pengabdian pada masyarakat dapat dilaksanakan program pemberdayaan bagi BUMDes dan pelaku usaha tersebut agar dapat meningkatkan resiliensi. Program pemberdayaan dilakukan dalam bentuk (1) dukungan fasilitasi *workshop* serta diskusi pengelola BUMDes dan pelaku usaha dalam melakukan pemetaan masalah serta (2) perumusan rencana aksi untuk mengurangi dampak dan pemulihan ekonomi pandemi COVID-19. Program pemberdayaan ini berhasil memetakan masalah dan rencana aksi untuk peningkatan resiliensi ekonomi pada masa pandemi serta pemulihan ekonomi melalui pengembangan usaha ekonomi ganda, seperti melestarikan usaha pariwisata sambil memajukan usaha tani, peternakan, budi daya jamur, dan industri rumah tangga herbal.

Kata Kunci: *BUMDes; ekonomi pedesaan; pandemi; pemberdayaan masyarakat*

Pendahuluan

Undang-Undang Desa No. 6 Tahun 2014 memberi ruang bagi tumbuhnya BUMDes yang bergerak di bidang desa wisata (Prabowo, 2014). Melalui BUMDes, ekonomi desa bisa digerakkan (Sidik, 2020) dan melalui wirausaha sosialnya, BUMDes bisa membuka lapangan pekerjaan bagi warga desa (Fauzanafi dan Hidayana, 2021). Hadirnya regulasi tersebut telah banyak direspons oleh banyak desa di Indonesia guna mengembangkan potensi wisata yang mereka miliki dengan membangun BUMDes desa wisata. Sebagian desa sangat berhasil dan sebagian yang lain masih dalam tahap dan proses pertumbuhan.

Di tengah-tengah semangat desa membangun desa melalui BUMDes wisata, pandemi COVID-19 telah membuat sektor pariwisata lumpuh. Sebagian sektor wisata berusaha untuk *survive* dan mengembangkan usaha yang adaptif dengan kondisi pandemi. Salah satu bidang wisata yang terdampak adalah desa wisata yang menyajikan berbagai kekayaan sosio-kultural di desa sebagai atraksi wisata. Sedikitnya pengunjung karena COVID-19 membuat banyak desa wisata juga mengalami kemunduran. Berbagai upaya telah dilakukan oleh beberapa desa wisata di DIY dan Jawa Tengah untuk beradaptasi dengan pandemi. Upaya tersebut berhasil karena mereka menerapkan pembangunan pariwisata berkelanjutan dan basis pengembangan BUMDes dan khususnya desa wisata adalah pada reproduksi modal sosial budaya masyarakat desa untuk sajian dan gerakan desa wisata. Upaya tersebut perlu dipelajari dan didiseminasikan ke desa-desa wisata yang masih tertinggal dalam mengembangkan adaptasinya.

Bertolak dari masalah di atas, pemberdayaan desa wisata yang dikelola oleh BUMDes relevan untuk dilakukan. Program pemberdayaan itu sangat relevan bila memperkuat desa wisata yang dikelola oleh BUMDes dan memberikan kesempatan kerja bagi masyarakat desa. Hal ini karena krisis ekonomi yang disebabkan oleh pandemi COVID-19 membutuhkan solusi yang cepat dan inovatif bagi pelaku desa wisata. Mereka hidup di desa dan kawasan pedesaan sarat dengan ketertinggalan akses informasi dan peluang usaha berbasis pada kekuatan modal material. Mereka dikhawatirkan akan terpukul ekonominya, baik pada masa pandemi COVID-19 maupun pada masa pemulihan ekonomi.

Pemberdayaan desa wisata dapat dilakukan dengan mencanangkan berbagai program, tergantung pada ketersediaan sumber daya manusia, anggaran, dan waktu. Dengan dukungan sumber daya dan dana yang terbatas, pemberdayaan diarahkan untuk memfasilitasi desa wisata untuk melakukan pemetaan masalah dan melakukan konsolidasi sehingga mereka memahami masalah, menemukan solusi, dan membuat program aksi yang adaptif. Dengan menghasilkan temuan itu, desa wisata dapat mengurangi kerentanan dan bahkan meningkatkan ketahanan ekonominya pada masa pandemi serta pemulihan ekonomi pascapandemi 2022. Dengan demikian, desa wisata bisa menjalankan agenda pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Untuk menjalankan agenda pemberdayaan desa wisata, program fasilitasi ini menggunakan konsep Chamber (1994) tentang pembangunan dari belakang. Dalam konsep Chamber ini, pembangunan pariwisata berkelanjutan harus berpijak pada potensi lokal dan partisipasi masyarakat. Selain itu, pembangunan desa wisata harus sejalan dengan amanah organisasi pariwisata dunia yang menekankan konsep berkelanjutan.

World Tourism Organization menyebutkan bahwa pariwisata berkelanjutan

merumuskan setidaknya terdapat 12 tujuan utama (Eticon, 2020). Beberapa tujuan tersebut yang relevan dengan program pemberdayaan ini adalah (1) memastikan terjadinya kelangsungan dan dimilikinya daya saing destinasi wisata (*economic viability*); (2) kontribusi pariwisata terhadap ekonomi masyarakat lokal (*local prosperity*); serta (3) melibatkan dan memberdayakan masyarakat lokal dalam perencanaan maupun pengambilan keputusan pengelolaan pariwisata (*local control*).

Metode Pemberdayaan

Mengikuti Hudayana (2017), pengabdian masyarakat ini menerapkan pendekatan *action research* (penelitian aksi) sebagai suatu penelitian terapan yang langsung melibatkan peneliti dan masyarakat sebagai kelompok sasaran untuk terlibat dalam proses perubahan. Pemberdayaan semacam itu menekankan partisipasi aktif masyarakat sehingga mereka mendapatkan manfaat secara langsung dari program yang yang dikerjakan (Chambers, 1994; Mikkelsen, 2011).

Dalam penelitian aksi ini, ada dua tahap kegiatan penting dalam memfasilitasi pengelola desa wisata yang dikelola oleh BUMDes, yakni sebagai berikut.

1. Memfasilitasi pengelola BUMDes desa wisata mengidentifikasi masalah yang dihadapi pada masa pandemi COVID-19 dan berbagai upaya yang telah dilakukan, keberhasilan, dan kegagalannya.
2. Memfasilitasi pengelola BUMDes desa wisata untuk melakukan pengembangan program sebagai adaptasi terhadap pandemi COVID-19 dan upaya untuk membuat desa wisata tetap mampu menjalankan agenda pembangunan pariwisata berkelanjutan.

Untuk menjalankan kegiatan pemberdayaan, langkah-langkah yang dilakukan adalah melakukan pengumpulan data sekunder dan primer terkait dengan situasi dan kondisi Desa Bleberan, desa wisata, dan BUMDes Desa Bleberan. Observasi partisipasi dan wawancara kepada berbagai pihak dilaksanakan agar data terkait dengan lokasi pemberdayaan menjadi lebih lengkap dan valid. Berdasarkan hal itu, dilakukan identifikasi potensi dan peluang yang telah tersedia yang selama ini telah dikelola

Tabel 1. Peserta *Focus Group Discussion*

No.	Nama	Keterangan
1	Tri Harjono	Ketua Pengurus Desa Wisata Bleberan
2	Oki Basyirudin	Pengelola Homestay dan Tour Guide Desa Wisata Bleberan
3	Diki	Pengelola Homestay dan Tour Guide Desa Wisata Bleberan
4	Sri Kustini	Pengusaha Kuliner Sri Gethuk dan Minuman Herbal Sri Agung
5	Atik Restiana	Sekretaris Desa Wisata Bleberan
6	Sri Lestari	Pengusaha Catering Desa Wisata Bleberan
7	Sunardi	Bendahara Pengurus Desa Wisata Bleberan
8	Suminto	Seksi Pengamanan dan Perparkiran Desa Wisata Bleberan

Sumber: Data Primer (2021)

maupun belum dikelola dengan baik oleh masyarakat Desa Bleberan. Berdasarkan data tersebut kemudian dilakukan analisis yang melibatkan warga masyarakat dan tokoh masyarakat sehingga dapat ditemukan langkah-langkah pemberdayaan yang bisa dilaksanakan secara *bottom-up*. Artinya, pemberdayaan tersebut memang didesain dan diputuskan serta dilaksanakan oleh masyarakat Desa Bleberan. Peran perguruan tinggi adalah sebagai fasilitator dan pemberi wawasan kepada pelaku-pelaku wisata tentang berbagai langkah yang bisa dilakukan ke depan. Pemberdayaan dilaksanakan secara *offline* dengan melibatkan warga masyarakat, salah satunya dengan melakukan FGD (*focus group discussion*) di lokasi wisata di desa itu. Adapun kelompok perwakilan yang dilibatkan adalah seperti pada Tabel 1 di atas.

Sejarah Desa, BUMDES, dan Potensi Wisata Bleberan

Sebelum adanya wisata, Desa Bleberan merupakan daerah yang terisolasi dan miskin. Banyak warga, khususnya pemuda, yang harus merantau untuk memenuhi kebutuhan hidup. Pada saat itu, Tri Harjono yang menjabat sebagai kepala desa mendapat tawaran bantuan dari pemerintah pusat dan daerah untuk memanfaatkan dan mengembangkan potensi desa. Potensi desa yang ada pada benak Tri Harjono pada saat itu adalah Goa Rancang Kencana dan Air Terjun Sri Gethuk. Melanjutkan perjuangan Haji Sukandi, tokoh masyarakat dari Padukuhan Menggoran yang telah memelopori kawasan wisata pada tahun 1974.

Namun, pengembangan desa wisata tersebut tidak mudah. Tri Harjono mengalami kendala penolakan dari tokoh agama setempat. Tokoh agama berpendapat bahwa kedatangan orang asing ke wilayah yang sakral, dalam hal ini Goa Rancang, akan mengikis budaya dan nilai-nilai sosial. Pada saat itu, Tri Harjono terus melakukan komunikasi dan negosiasi dengan para tokoh agama. Hingga akhirnya, para tokoh agama memberikan syarat agar setuju dengan pembangunan desa wisata. Syarat tersebut adalah menambahkan aspek agama dalam visi desa.

Syarat dari tokoh agama untuk menambahkan aspek agama dalam visi desa disetujui oleh Tri Harjono. Visi Desa Bleberan berubah pada tahun 2007 menjadi “pembangunan desa wisata yang produktif, indah, tertib, aman, dan agamis”. Visi Desa Bleberan juga mengalami perubahan pada tahun 2013 menjadi “terwujudnya desa wisata yang produktif, indah, tertib, aman dan religi”.

Setelah mendapat persetujuan dari tokoh agama, Tri Harjono bersama dengan karang taruna, dan masyarakat desa mulai mempersiapkan dan membangun sarana prasarana yang dibutuhkan. Pada saat itu, pemerintah desa menggunakan dana dari Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri (PNPM Mandiri) hingga tahun 2010 dan dilanjutkan dengan program PNPM Pariwisata pada tahun 2011 hingga 2013 (SIDA Bleberan, 2016).

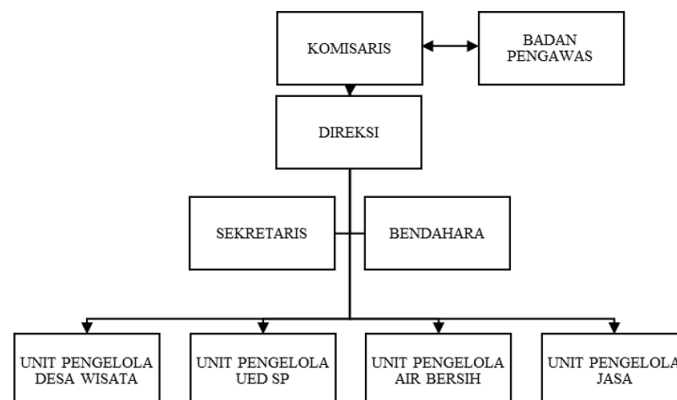
Tri Harjono mengawali pembentukan pengurus pengelola desa wisata dengan diterbitkannya surat keputusan kepala desa dengan nomor 03/KPTS/2007 (SIDA Bleberan, 2016). Setelah itu, para pengurus dan juga karang taruna melakukan studi banding ke desa wisata lain yang sudah terlebih dahulu berdiri, dibersamai dengan pembangunan sarana dan prasarana di lokasi desa wisata oleh masyarakat. Pembangunan dan proses belajar dari desa lain dilakukan selama tiga tahun dari 2007 hingga 2010.

Tepatnya pada 3 Juli 2010, Desa Wisata Bleberan Gunungkidul diresmikan dan diluncurkan oleh Ibu Badingah, Bupati Gunungkidul pada saat itu.

Hadirnya desa wisata semakin lama dirasakan oleh masyarakat desa. Banyak perantau yang pulang ke desa untuk menjadi bagian pengurus dan pengelola desa wisata. Selain itu, potensi ekonomi selain dari wisata alam pun terangkat. Sektor kuliner dan juga budaya menjadi daya tarik bagi wisatawan. Dampaknya, warga yang tidak menjadi pengurus desa wisata mendapat tambahan pendapatan dari pertunjukan seni budaya, warung, *homestay*, ojek, dan supir travel wisata. Kondisi Desa Bleberan sebelum adanya BUMDes merupakan daerah miskin (Sumarjono, 2017). Kemudian, keberadaan BUMDes memengaruhi kondisi ekonomi desa sehingga pada tahun 2016, Desa Bleberan masuk kategori desa berkembang dan pada tahun 2020 sudah masuk desa dengan status IDM (indeks desa membangun) sebagai desa maju.

Pengelolaan Desa Wisata

Pengelolaan Desa Wisata Bleberan berada di bawah lembaga BUMDes Anugrah Desa Bleberan. BUMDes Anugrah berdiri sejak 5 Juni 2008. Pada awalnya, BUMDes hanya berbekal surat keputusan kepala desa dan baru dua tahun setelahnya Pemdes mengesahkan Perdes No. 05/2010 tentang tata cara pendirian BUMDes. Berdasarkan buku laporan pertanggungjawaban, BUMDes Anugrah menaungi empat unit usaha. Unit usaha pertama adalah Pengadaan Air Bersih (PAB), Unit Ekonomi Desa Simpan Pinjam (UED-SP), Unit Jasa dan Pengelolaan Objek Wisata. Dari ketiga Unit Usaha, usaha yang paling besar hasil dan pendapatannya adalah unit desa wisata. Secara struktur, BUMDes Anugrah dikepalai oleh komisaris dan diawasi oleh Badan Pengawas BUMDes.



Gambar 1. Struktur Pengurus BUMDes Anugrah Desa Bleberan. Sumber: (Hardjono & Raditya, 2016)

Unit Pengelolaan Desa Wisata adalah unit paling sukses di antara unit lainnya. Pendapatan paling banyak diperoleh pada tahun 2018 dengan pendapatan mencapai 2,68 miliar, sedangkan kunjungan paling banyak adalah di tahun 2015 dengan total pengunjung, baik domestik maupun mancanegara, mencapai 140.315 orang. Dari pendapatan tersebut, BUMDes membaginya ke beberapa alokasi dana seperti pemupukan modal, pendapatan asli desa (PAD), pengembangan potensi, dana pengurus BUMDes, dana cadangan, dana pendidikan, serta dana religi dan sosial.

Dalam perjalanannya, BUMDes Anugrah mengalami berbagai kendala seperti bencana alam. Pada saat banjir Gunungkidul terjadi pada tahun 2018, Desa Wisata khususnya objek wisata Air Terjun Sri Gethuk mengalami kerugian berupa hilangnya kapal dan beberapa peralatan milik BUMDes akibat hanyut terbawa banjir.

Potensi Wisata

1. Goa Rancang Kencana

Desa Wisata Bleberan menawarkan dua objek wisata, salah satunya yaitu Goa Rancang Kencana dan Air Terjun Sri Gethuk. Goa Rancang Kencana terletak di kawasan hutan milik Dinas Kehutanan Kabupaten Gunungkidul, tetapi secara administratif masih masuk wilayah Desa Bleberan. Kawasan Goa Rancang Kencana cenderung tandus dan hanya ada tanaman kayu keras seperti jati dan kayu putih yang ditanam di sekitaran gua. Kawasan Goa Rancang Kencana diklaim sudah pernah dihuni oleh manusia sejak 3.000 tahun lalu. Jejak kehidupan ditemukan berupa temuan tulang manusia di dalam gua (Yuwono, 2018). Goa Rancang Kencana juga pernah digunakan untuk tempat sembunyi Laskar Mataram pada tahun 1739 ketika pemerintah kolonial merebut Madiun dan mengusir para laskar.

Pada abad ke-21, sebelum digunakan sebagai objek wisata, Goa Rancang Kencana dimanfaatkan masyarakat sebagai tempat olahraga bulu tangkis, bahkan hingga tahun 2016, garis pembatas lapangan masih tampak terlihat (Hardjono & Raditya, 2016). Namun, setelah dimanfaatkan sebagai objek wisata, gua tersebut sekarang digunakan sebagai objek edukasi, layar tancap, dan juga tempat rapat atau pengelola menyebutnya sebagai paket *meeting* dalam gua. Goa Rancang Kencana pada tahun 2021 juga digunakan sebagai tempat pembuatan video *Wonderful Indonesia*.

2. Air Terjun Sri Gethuk

Air Terjun Sri Gethuk merupakan air terjun yang terletak tidak jauh dari kawasan Goa Rancang Kencana dan masih masuk dalam kawasan perhutani Gunungkidul. Air terjun ini memiliki ketinggian lebih dari 25 meter. Air Terjun Sri Gethuk merupakan bagian dari aliran sungai Oyo dengan debit air 501 liter/detik. Dengan kondisi lokasi sungai yang bertebing, ketinggian tebing di sepanjang sungai bisa mencapai 50 meter (SIDA Bleberan, 2016). Berbeda dengan kawasan Goa Rancang Kencana yang berada lebih tinggi dan juga tandus, kawasan air terjun justru lebih hijau karena sumber air yang melimpah. Sepanjang sungai dapat terlihat pepohonan yang membuat rindang kawasan Air Terjun Sri Gethuk.

Pada awal pengembangan wisata tahun 2007, masyarakat bergotong-royong membangun akses jalan dengan dana swadaya masyarakat dan bantuan dari PNPM Mandiri. Kawasan Air Terjun Sri Gethuk sebelumnya dipenuhi bebatuan dari longsoran tebing akibat gempa vulkanik Gunung Merapi tahun 2006. Namun, hanya beberapa bongkahan yang dapat dipindah, beberapa bongkahan batu besar tidak dipindah hingga sekarang karena sudah di luar kemampuan warga, sedangkan untuk mendatangkan alat berat tidak mungkin karena akses ke area air terjun yang sulit.

Memanfaatkan potensi air terjun, pengelola menyediakan berbagai fasilitas seperti perahu yang dibuat sendiri oleh warga. Perahu tersebut memanfaatkan *drum* plastik bekas sebagai alat pengapung dan diberi rangka kayu dibagian atas dengan dilengkapi kursi

kayu. Perahu tersebut dapat menampung sekitar 12 orang. Pengunjung akan diantar memutar kawasan air terjun dengan mesin diesel berkekuatan 5.5 PK (Hardjono & Raditya, 2016).

3. Pertunjukan Tradisional dan Kesenian Jawa

Selain adanya dua objek wisata, pengelola juga menyediakan berbagai atraksi budaya tradisional seperti upacara Kirab Rasulan. Kirab rasulan adalah kegiatan yang dilakukan setahun sekali setelah masa panen berakhir. Pada acara ini, warga di setiap rumah akan membuat *sego wuduk sak tenggok* atau nasi dalam *ceting*, yaitu 'perkakas tradisional Jawa'.

Selain itu, ada pula kegiatan seperti Nyadranan, yaitu upacara *kirab* gunung apem dan pisang yang diarak ke makam bekel/lurah Kromo Wongso, sebagai lurah pertama Desa Bleberan pada tahun 1720-an. Upacara ini dilaksanakan pada tanggal 25 *ruwah* atau dilakukan di bulan sebelum bulan Ramadan. Ada pula Kenduri robyongan, yaitu upacara yang dilaksanakan setahun sekali di hari Jumat Legi di bulan Suro. Kenduri dilakukan oleh masyarakat perempuan dan juga seluruh anak-anak. Setiap peserta nantinya akan menggunakan kalung dari daun sayur pare yang direbus. Upacara Kenduri biasanya diakhiri dengan kegiatan *rebutan jajanan pasar* yang diyakini warga memiliki berkah tersendiri ketika mendapatkannya.

Para pengelola desa wisata juga memberikan pertunjukan tradisional yang bisa dilakukan setiap saat berupa kesenian tradisional. Hal ini dilakukan agar pengunjung tidak perlu menunggu setiap tahunnya hanya untuk melihat pertunjukan upacara yang dilakukan setahun sekali. Namun, ada pilihan lain, salah satunya adalah kesenian tradisional. Para pengunjung dapat memesan paket wisata dengan berbagai macam pertunjukan seperti wayang kulit, seni karawitan, *kethoprak*, *doger-doger*, *jathilan*, *thoklek thoklik*, dan reog.

4. Kuliner Tradisional

Daya tarik utama kuliner di kawasan Desa Wisata Bleberan adalah sego tiwul dan sego pletik sambel walang dengan sayur lombok ijo. Segi pletik adalah sejenis makanan dari campuran tiwul dan juga nasi/beras. Segi pletik adalah makanan peralihan dari masa pakeklik yang biasanya warga mengonsumsi tiwul ke masa panen yang biasanya warga mengonsumsi beras. Khusus sego tiwul, pengunjung dapat membeli dalam bentuk kemasan sebagai oleh-oleh.

Selain sego pletik dan nasi tiwul, Kawasan Desa Wisata juga menyediakan berbagai olahan jamur. Olahan jamur baru dipasarkan pada tahun 2021 sebagai strategi diversifikasi produk olahan pangan. Desa Wisata Bleberan juga mengembangkan industri lokal berbasis toga (tanaman obat keluarga) berbentuk bubuk dan siap seduh seperti kunir putih, beras kencur, kunir asem, wedang uwuh, dan wedang serih.

Dampak Pandemi COVID-19

Pandemi COVID-19 telah berdampak pada sektor pariwisata Indonesia. Tingginya kasus COVID-19 di Indonesia berimbas pada industri pariwisata di Indonesia. Pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar maupun penutupan akses keluar masuk negara memberikan kerugian pendapatan negara di sektor pariwisata sebesar 20,7 miliar

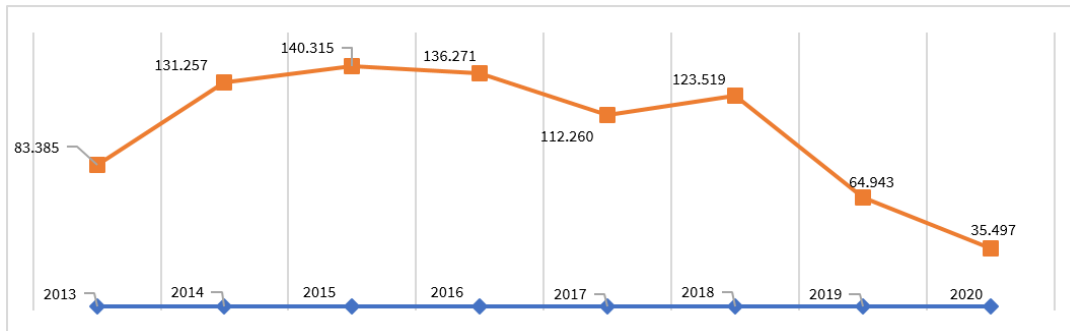
rupiah. Selama pandemi COVID-19, kedatangan turis global di Indonesia mengalami penurunan drastis, yaitu sebesar 58% hingga 78% atau 847 juta hingga 1.139.000 (Yuswohady, 2021). Penurunan jumlah wisatawan juga berdampak pada okupansi pada berbagai fasilitas penginapan seperti hotel, *homestay*, dan sejenisnya. Berdasarkan data Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (2021), pada Januari hingga Februari 2021, tingkat okupansi masih berada pada angka 49,17% dan 49,22%. Namun, angka-angka tersebut menurun drastis pada bulan Maret (32,24%) dan April (12,67%). Sebanyak 12,91 juta pekerja atau pelaku usaha di bidang pariwisata mengalami pengurangan jam kerja. Bahkan, 939 ribu orang tidak bekerja (Kemenparekraf, 2021). Berbagai lapangan pekerjaan di sektor pariwisata juga ikut terkena imbas pandemi COVID -19. Sekitar 409 ribu tenaga kerja di sektor pariwisata Indonesia harus rela kehilangan pekerjaannya (Badan Pusat Statistik, 2020).

Sektor pariwisata Yogyakarta juga terkena dampak pandemi COVID-19. Hal ini dapat dilihat dari nilai kerugian industri pariwisata Yogyakarta yang mencapai 10 triliun rupiah pada masa pandemi COVID -19 (Pangaribowo, 2021). Nilai kerugian tersebut merupakan perhitungan omset bisnis dari anggota Gabungan Industri Pariwisata Indonesia (GIPI) Yogyakarta. Nominal tersebut belum termasuk nilai kerugian dari dampak sistemis yang dialami oleh ekosistem turunan atau penunjang sektor pariwisata, seperti transportasi, UMKM, dan industri kreatif lainnya. Sektor penginapan di Yogyakarta tingkat okupansinya berada di bawah 10%. Bahkan tidak sedikit yang memiliki tingkat okupansi 0% dan harus gulung tikar. Sebagai gambaran, hotel berbintang tiga di Yogyakarta rata-rata mengalami kerugian sebesar Rp400.000.000,00 per bulan dan hotel berbintang empat di angka Rp800.000.000,00 per bulan pada masa pandemi COVID-19 (Sucahyo, 2021). Sementara itu, di sektor transportasi pariwisata Yogyakarta, total kerugian berkisar 550 miliar rupiah dalam kurun waktu Maret 2020–Februari 2021. Alhasil, 600 pekerja di sektor transportasi wisata Yogyakarta, mulai dari tenaga admin, mekanik, hingga penjaga keamanan harus terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Sementara itu, untuk sopir dan kru angkutan wisata yang kehilangan pekerjaannya berjumlah 2.600 orang (Sucahyo, 2021).

Salah satu jenis industri pariwisata yang sedang berkembang di Yogyakarta adalah desa wisata. Terdapat 214 desa wisata di Yogyakarta yang terbagi menjadi empat kategori, yaitu maju (25), berkembang (57), tumbuh/embrio (50), dan layak jual (82) (Hanggraito & Sanjiwani, 2020). Mewabahnya virus corona ke berbagai wilayah pedesaan di Indonesia benar-benar melumpuhkan aktivitas ekonomi desa wisata. Berdasarkan hasil survei Desa wisata Institute (2020) terhadap 97 desa wisata di seluruh Indonesia, 92,8% atau sejumlah 90 desa wisata telah terdampak pandemi COVID-19. Dari 97 desa wisata yang menjadi responden penelitian, sebanyak 33 merupakan desa wisata di Yogyakarta.

Pandemi COVID-19 juga telah berdampak pada sektor pariwisata yang dikelola oleh BUMDes Bleberan. Salah satu indikatornya adalah penurunan jumlah pengunjung. Pada tahun 2020, tercatat hanya terdapat 35.497 wisatawan yang berkunjung ke Desa Wisata Bleberan. Angka tersebut berkurang sekitar 40% dari jumlah wisatawan pada tahun 2019 yang berjumlah 64.943 orang. Menurunnya jumlah pengunjung, terutama pada tahun 2020, disebabkan oleh berbagai hal. *Pertama*, sebelum adanya Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM), minat masyarakat atau wisatawan lokal dan yang berasal dari luar daerah untuk berwisata menurun drastis. Mereka lebih memilih

untuk *stay at home* sebagai upaya preventif agar tidak tertular virus corona. *Kedua*, pandemi COVID-19 merupakan wabah yang bersifat global. Potensi kunjungan dari wisatawan mancanegara berkurang drastis. Mereka berpikir dua kali untuk melakukan perjalanan internasional dalam rangka berwisata.



Grafik 1. Perbandingan Jumlah Pengunjung Desa Wisata Bleberan (2013–2020). Sumber: Profil Desa Wisata Bleberan (2021)

Merosotnya jumlah pengunjung pada masa pandemi COVID-19 tentu memberikan efek terhadap penurunan pendapatan yang diterima BUMDes Bleberan dari lini usahanya di sektor pariwisata. Pada tahun 2019 saat wabah pandemi COVID-19 belum menyerang, pendapatan yang diperoleh BUMDes Bleberan kurang lebih mencapai 1,5 miliar rupiah. Sementara itu, pada tahun 2020, pendapatan yang diperoleh hanya berada di sekitar Rp724.000.000,00.



Grafik 2. Perbandingan Jumlah Pendapatan BUMDes Desa Bleberan (2013–2020). Sumber: Profil Desa Wisata Bleberan (2021)

Berbagai jenis usaha masyarakat lokal penunjang Desa Wisata Bleberan seperti di bidang jasa penginapan (*homestay*), pemandu wisata (*tour guide*), hingga kuliner juga mengalami penurunan pendapatan. Diki, seorang *tour guide* di Desa Wisata Bleberan mengaku jika hampir dua tahun belakangan ini dia tidak memiliki pekerjaan karena hampir tidak ada pengunjung yang datang. Minimnya pengunjung yang datang berpengaruh terhadap geliat usaha di bidang jasa penginapan. Oki Basyirudin, salah satu pengelola *homestay* di Desa Wisata Bleberan mengaku adanya jumlah pengunjung yang semakin berkurang drastis pada masa pandemi COVID-19 telah berdampak pada berkurangnya penghasilan yang diterima. Sebelum masa pandemi, banyak wisatawan yang

berkunjung secara kelompok yang berasal dari berbagai kalangan instansi pemerintahan dari luar daerah, instansi perusahaan, hingga sekolah. Lambat laun, jumlah usaha jasa penyewaan *homestay* yang ada semakin berkurang karena tidak ada pemasukan untuk pengembangan fasilitas maupun infrastruktur. Tak ketinggalan, pelaku usaha kuliner juga terkena imbas dari pandemi COVID-19. Sri Kustini, salah satu pelaku usaha di bidang kuliner warung makan dan berbagai makanan ringan (*gethuk*, krecek, tiwul ayu, sagon, dll.) mengaku bisa memperoleh pendapatan hingga Rp2.000.000,00–Rp3.000.000,00 per hari. Pada masa pandemi COVID-19, ia hanya memperoleh tidak lebih dari Rp500.000,00, bahkan bisa kurang dan tidak ada pemasukan sama sekali ketika objek wisata ditutup.

Menurunnya pendapatan BUMDes memengaruhi pendanaan untuk perawatan infrastruktur berbagai fasilitas penunjang Desa Wisata Bleberan seperti *homestay*. Hingga kini, terdapat 30 *homestay* di Desa Bleberan dan tidak lebih dari separuhnya memiliki fasilitas yang sesuai dengan standar yang telah ditetapkan serta dianjurkan oleh Dinas Pariwisata Gunungkidul maupun Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Konsep *homestay* di Desa Bleberan adalah sewa kamar atau ruangan yang berada atau menyatu dengan pemiliknya. Sayangnya, masih terdapat *homestay* yang belum memiliki fasilitas seperti pendingin ruangan hingga kasur pegas (*springbed*). Sering kali wisatawan mengeluhkan fasilitas yang dirasa belum memenuhi standar pada umumnya. Belum meratanya kualitas layanan yang sesuai standar pada setiap *homestay* disebabkan oleh pengembangannya masih dikelola oleh masing-masing pemilik sehingga pengelolaannya sangat bergantung dari kekuatan ekonomi masing-masing pemilik. Ditambah lagi, 30 *homestay* yang ada masih belum terkoneksi satu sama lain dalam pengelolaan atau kepengurusannya.

Selain desa wisata, BUMDes Bleberan juga memiliki lini usaha lainnya, yaitu jasa penyedia air bersih, gedung olahraga, simpan pinjam, dan rencana pengembangan budi daya jamur. Dari berbagai lini usaha tersebut, desa wisata memiliki kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan BUMDes secara umum. Dengan adanya pandemi COVID-19, praktis sektor desa wisata tidak lagi menyumbang nominal secara signifikan terhadap pendapatan BUMDes. Jumlah pendapatan BUMDes pada masa pandemi

Tabel 2. Perbandingan Alokasi SHU BUMDes Bleberan (2017–2020)

	2018	2019	2020
Pendapatan Tahunan	2.683.677.911	1.585.070.500	724.360.000
Pemupukan Modal (15%)	402,551,687	237,760,575	108,654,000
PAD Desa (25%)	670,919,478	396,267,625	181,090,000
Pengembangan potensi (25%)	670,919,478	396,267,625	181,090,000
Dana Pengurus BUMDes (15%)	402,551,687	237,760,575	108,654,000
Dana Cadangan (5%)	134,183,896	79,253,525	36,218,000
Dana pendidikan (5%)	134,183,896	79,253,525	36,218,000
Dana Religi dan sosial (10%)	268,367,791	158,507,050	72,436,000

Sumber: Profil Desa Wisata Bleberan (2021)

(2020) sebesar Rp724.000.000,00 merupakan kontribusi dari lini usaha air bersih yang tidak terdampak pandemi COVID-19 yang setiap tahunnya memiliki pendapatan bersih sekitar Rp500.000.000,00.

Pendapatan BUMDes setiap tahunnya dialokasikan untuk berbagai kepentingan, mulai dari pemupukan modal (15%), PAD Desa (25%), pengembangan potensi (25%), dana pengurus BUMDes (15%), dana cadangan (5%), dana pendidikan (5%), hingga dana religi dan sosial (10%). Lesunya sektor desa wisata di masa pandemi COVID-19 berimplikasi terhadap nominal alokasi SHU BUMDes Bleberan yang diambil dari pendapatan BUMDes setiap tahunnya. Pada tahun 2020, penurunan nominal alokasi SHU untuk setiap kepentingan mencapai 50% dibandingkan tahun 2019 (Tabel 2).

Penguatan Resiliensi BUMDes dan Pelaku Usaha Melalui Pengabdian Masyarakat

Peningkatan Promosi

Sebelum masa pandemi COVID-19, pemasaran Desa Wisata Bleberan lebih banyak dilakukan secara konvensional melalui selebaran brosur dan berbagai jaringan atau relasi yang dimiliki oleh para pengelola desa wisata. Pada masa pandemi COVID-19, para pengelola Desa Wisata Bleberan mencoba untuk meningkatkan berbagai promosi secara *online*. Pendekatan pemasaran diarahkan dengan memanfaatkan perilaku atau gaya hidup digital masyarakat kekinian. Optimalisasi pemanfaatan berbagai media sosial maupun media lainnya yang berbasis digital dirasa menjadi strategi yang tepat untuk mempromosikan desa wisata. Pembuatan konten narasi di berbagai media digital (Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, dll.) yang dapat memancing animo publik untuk singgah ke Desa Wisata Bleberan pada saat wisata kembali dibuka menjadi salah satu hal yang coba dilakukan oleh para pengelola Desa Wisata.

Pengembangan Paket Tur Baru

Adanya wabah pandemi COVID-19 seharusnya tidak mengurangi semangat dalam membangun desa melalui pengembangan pariwisata. Momentum ini menjadi kesempatan bagi pengelola desa wisata untuk melakukan upaya perbaikan fasilitas, peningkatan pelayanan, keterampilan, maupun melakukan inovasi seperti paket wisata digital. Pengelola Desa Wisata Bleberan dapat belajar dari desa-desa yang sudah berhasil terlebih dahulu dalam mengemas paket wisata secara virtual. Salah satu *best practice* desa yang melakukan paket wisata digital adalah Desa Wisata Nglanggeran, Yogyakarta.

Desa Wisata Nglanggeran memiliki paket wisata digital dengan tajuk “*Virtual Tour* Desa Wisata Nglanggeran” yang berupa kegiatan wisata atau jalan-jalan yang dilakukan secara *online*. Peserta akan diajak untuk menjelajah berbagai destinasi pilihan dan diberikan penjelasan mengenai destinasi pariwisata yang dituju layaknya berwisata dengan jasa *tour guide*. Program ini bekerja sama dengan komunitas Virtual Project yang diinisiasi oleh mahasiswa Magister Pariwisata Berkelanjutan Universitas Padjajaran, Ina Geo, Wisata Sekolah, Seruang, Outing.id, dan Caventer.

Penerapan Sistem E-commerce dalam Pemasaran Desa Wisata

E-commerce merupakan salah satu alternatif pemasaran yang mengandalkan internet

untuk memublikasikan sebuah produk dan jasa yang ditawarkan. Paket wisata *e-commerce* dapat menjadi salah satu solusi ketika wisata masih sepi dari pengunjung dan dalam rangka pemulihan pada masa pandemi COVID-19. Metode ini dapat mengatasi kekurangan promosi desa wisata yang masih dilakukan secara konvensional maupun penjualan berbagai pernik-*merchandise* desa wisata transaksinya masih dilakukan secara *face to face* sehingga masyarakat dapat lebih mudah mengetahui informasi tentang desa wisata dan berbagai layanan jasa serta produknya. Secara umum, sistem *e-commerce* dapat membantu pihak BUMDes Bleberan dan pengelola desa wisata dalam mempromosikan paket wisata serta menjual produknya kepada wisatawan lokal maupun mancanegara. Sistem ini dapat menarik wisatawan dan merangsang pihak pengelola desa wisata Bleberan untuk lebih kreatif dan inovatif pada era persaingan pasar global.

Resiliensi dengan Memajukan Usaha Tani

Pelaku usaha Desa Wisata Bleberan pada masa pandemi COVID-19 mulai beralih atau kembali ke sektor pertanian dan perkebunan. Salah satunya dilakukan oleh Sunardi, salah satu pengurus Wisata Sri Gethuk yang memilih untuk kembali berladang jagung dan singkong. Sebagai gambaran umum, 80% dari penduduk Dusun Menggoran, Bleberan pada masa pandemi memilih untuk kembali bertani atau mengolah lahan lahan perhutani. Mayoritas lahan di Desa Bleberan digunakan untuk sektor kehutanan dengan tanaman jati dan kayu putih. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunungkidul telah bekerja sama dengan masyarakat Desa Bleberan untuk mengizinkan mereka merawat dan menjaga tanaman jati dan kayu putih dengan sistem bagi hasil dari hasil panen yang dilakukan. Bahkan, untuk lahan yang ditanami kayu putih oleh Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunungkidul boleh ditanami tanaman jagung, singkong, dan berbagai jenis tanaman palawija oleh warga yang merawat dan menjaga lahan tersebut.

Sebagian besar lahan di Gunungkidul berstatus sebagai Hutan Kemasyarakatan (HKm). Di Desa Bleberan terdapat kurang lebih 200 ha lahan yang berstatus HKm, dengan 40 ha merupakan lahan khusus tanaman jati dan sisanya campuran tanaman kayu putih serta jati yang dapat dikelola oleh masyarakat untuk menanam berbagai tanaman palawija. Sistem pengelolaannya adalah bagi hasil dengan pihak Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Gunungkidul. Akses terhadap luas lahan yang dikelola oleh masing-masing warga bervariasi, tergantung dari kemampuan masing-masing. Rata-rata setiap warga dapat mengelola satu hingga seperempat hektar.

Pada masa pandemi COVID-19, sektor ini menjadi jaring pengaman sosial (*social safety net*) bagi para pelaku usaha di sektor wisata Desa Bleberan dengan kondisi banyak warga yang mencari sumber penghidupan baru. Selama masa pandemi, terdapat 90 karyawan di Wisata Sri Gethuk beralih ke sektor pertanian atau perkebunan. Para petani di Gunungkidul secara umum tidak terlalu terpengaruh dengan adanya pandemi COVID-19. Mayoritas pelaku usaha di Desa Wisata Bleberan juga merupakan seorang petani. Jika tidak ada pengunjung yang datang, mereka akan kembali ke sektor pertanian. Ketika nanti wisata sudah kembali dibuka dan mulai ramai pengunjung, mereka akan membagi tugas dengan anggota keluarga, misalnya kepala keluarga akan tetap berladang di sawah atau kebun, sementara istri dan anak-anaknya berjualan di lokasi Desa Wisata Bleberan. Bagi mereka, profesi di sektor pertanian dan perkebunan sangat disayangkan

jika dilepas seutuhnya karena pada masa pandemi seperti saat ini, harga jual produk pertanian dan perkebunan cenderung stabil bahkan meningkat.

Pengembangan Budi Daya Jamur

BUMDes Bleberan telah merencanakan usaha pengembangan budi daya jamur tiram. Saat ini telah terdapat 80 rumah jamur yang ke depannya diharapkan menjadi sebuah sentra wisata jamur karena semua olahan jamur akan ada di Desa Wisata Bleberan. Harapannya, semua wisatawan yang datang dapat menikmati wisata kuliner jamur dan mendapatkan ilmu secara teori maupun praktik terkait pengembangan budi daya jamur tiram. Pada tahun 2018, Desa Bleberan bekerja sama dengan Yayasan Global Saemaul Undong dari Korea Selatan dalam pembangunan Jamur Center dan pembentukan serta pendampingan kepada kelompok petani jamur. Program tersebut merupakan salah satu bentuk realisasi program kerja sama *sister province* antara DIY dengan Provinsi Gyeongsangbuk, Korea Selatan, di Desa Bleberan, Kecamatan Playen, Gunungkidul.

Alasan utama di balik pemilihan jamur tiram sebagai komoditas yang dikembangkan adalah rasanya yang khas serta kandungan nutrisinya yang tinggi, bahkan dapat digunakan sebagai obat. Jamur memiliki kandungan protein sebesar 31% dan mengandung asam amino esensial yang mampu menurunkan hipertensi, mengurangi kolesterol, dan memperbaiki sirkulasi darah. Jamur tiram juga dapat dikonsumsi sebagai sayuran atau sebagai bahan olahan seperti keripik jamur atau makanan ringan lainnya. Selain itu, budi daya jamur tiram juga memiliki berbagai keuntungan seperti tidak memerlukan lahan yang luas dalam pengelolaannya. Sampah dari budi daya jamur juga dapat diolah menjadi pupuk organik yang mampu menyuburkan tanah.

Home Industry di Bidang Herbal

Salah satu inovasi yang dilakukan oleh pelaku usaha kuliner di Desa Wisata Bleberan adalah dengan mengolah tanaman-tanaman herbal menjadi jamu atau minuman sehat. Pada masa pandemi, permintaan terhadap jamu dan minuman sehat atau sejenisnya meningkat pesat karena setiap orang ingin menjaga imun tubuh mereka. Sri Kustini merupakan salah satu pelaku usaha yang bergerak di bidang minuman herbal. Pada tahun 2017, ia sudah memulai usaha di bidang herbal yang diberi nama 'Herbal Sri Agung'. Usaha herbal tersebut melayani pemesanan minuman siap olah seperti wedang uwuh, wedang sere, jahe merah, jahe kristal, kunir putih, temu lawak kristal, serta minuman siap saji berupa beras kencur, kunir asem, dan temulawak. Dalam kesehariannya, Herbal Sri Agung dikelola oleh 15 karyawan, yang terdiri atas 4 orang untuk proses pengolahan



Gambar 2. Jamur Tiram yang Dikelola Kelompok Petani Jamur Desa Bleberan. Sumber: Dokumentasi penelitian (2021)

dan pembuatan produk herbal, 5 orang karyawan yang merupakan mitra petani yang menanam bahan baku tanaman herbal, 2 karyawan khusus untuk produksi minuman jamu, 2 orang yang bertugas untuk pengemasan produk, dan 2 orang yang bertugas sebagai pengantar produk ke berbagai toko-toko di daerah Gunungkidul dan sekitarnya.



Gambar 3 .Contoh Produk Herbal Sri Agung. Sumber: Dokumentasi Penelitian (2021)

Dengan berlatar belakang sebagai mantan pegawai Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Gunungkidul membuat Sri Kustini memiliki modal sosial dalam bentuk relasi atau jaringan untuk mengajak berbagai *stakeholder* terkait melakukan program pendampingan dan pelatihan terhadap kelompok masyarakat yang berminat untuk terjun ke usaha minuman herbal. Sejauh ini telah terdapat berbagai pelaksanaan program pendampingan atau pelatihan seperti dari Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Gunungkidul dan Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI). Berbagai program pendampingan dan pelaksanaan tersebut dilaksanakan di rumahnya yang juga merupakan rumah produksi minuman herbal dan Sekretariat Kelompok Wanita Tani Sri Agung. Bahkan, Herbal Sri Agung pernah menjadi destinasi wisata pelatihan pengolahan produk herbal dari berbagai kalangan wisatawan.

Dalam eksistensinya, Herbal Sri Agung masih mengalami berbagai kendala, yang di antaranya meliputi ketersediaan alat produksi, karyawan, hingga proses pemasaran dan pengiriman produk. Untuk alat produksi, ia merasa peralatan yang ada selama ini masih belum dapat menghemat waktu dan jumlah tenaga. Ia berharap ada inovasi alat produksi yang lebih canggih sehingga dapat menghemat waktu dan biaya produksi. Untuk proses pemasaran, ia juga merasa kurang mengoptimalkan metode pemasaran secara *online*. Para pengelola Herbal Sri Agung mayoritas masih belum terampil dalam menggunakan berbagai *gadget* yang dapat mendukung *online marketing*. Selama ini, metode pemasaran masih dilakukan secara konvensional dengan dititipkan di berbagai toko dan menunggu wisatawan yang datang di Desa Wisata Bleberan. Selain itu, untuk menunjang bisnis pemasaran *online*, ia juga berharap agar Desa Wisata Bleberan memiliki jasa ekspedisi atau pengiriman paket agar berbagai produk yang dibeli secara *online* oleh konsumen dari luar daerah dapat dikirim dengan mudah.

Kesimpulan dan Rekomendasi

Pandemi COVID-19 secara nyata memang memberikan dampak yang sangat signifikan terhadap pariwisata di Desa Bleberan. Dampak tersebut tidak hanya dirasakan oleh BUMDes sebagai pengelola wisata, tetapi juga rumah tangga yang terlibat dalam kegiatan pariwisata. Jumlah kunjungan wisatawan yang menurun drastis, baik ke objek wisata Gua Rancang Kencana maupun Air Terjun Sri Getuk, telah membawa dampak terhadap aktivitas pendukung pariwisata, baik kuliner, usaha pendukung berupa oleh-oleh, maupun *homestay* yang tersedia di desa tersebut. Keadaan tersebut telah menurunkan pendapatan Desa Bleberan dan warga masyarakat secara drastis. Selama hampir dua tahun, kondisi perekonomian desa dan warga masyarakat mengalami stagnansi dan bahkan kemunduran.

Bagi sebagian warga masyarakat, kondisi tersebut disiasati dengan meningkatkan aktivitas di sektor pertanian, terutama dengan memanfaatkan lahan perkebunan milik perhutani yang tersebar luas di sekitar desa tersebut. Mereka bertanam berbagai macam palawija seperti jagung, cabai, kedelai, sayuran, empon-empon, dan lain sebagainya di sela-sela tanaman kayu putih dan pohon pinus milik Kementerian Kehutanan. Dengan cara itu, warga masyarakat mampu bertahan hidup dan mencukupi kebutuhan mereka meski dalam kondisi keterbatasan. Selain itu, sebagian warga kemudian kembali melakukan mobilitas ke perkotaan untuk bekerja di berbagai sektor yang masih berjalan pada masa pandemi, seperti di sektor bangunan, berdagang kecil-kecilan, dan aktivitas lainnya.

Pengabdian masyarakat berupaya memberdayakan masyarakat untuk kembali menata dan mengembangkan berbagai potensi wisata dan pendukung wisata dengan cara mengajak masyarakat untuk menemukenali potensi yang mereka miliki sehingga pada masa pandemi bisa digunakan untuk bertahan hidup dan bahkan dapat ditingkatkan bila pandemi berakhir dan sektor pariwisata di Desa Bleberan bangkit dan bergerak kembali. Pengabdian melalui pendekatan partisipasi warga telah berhasil memetakan dan meningkatkan kembali gairah warga untuk bangkit menyikapi pandemi dan menyongsong era baru ke depan.

Daftar Pustaka

- Badan Pusat Statistik. (2020). *Statistik Indonesia 2020*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- Hanggraito, A.A., & Sanjiwani, G. (2020). Tren Segmentasi Pasar dan Perilaku Wisatawan Taman Bunga Amaryllis di Era 4.0. *Journal of Tourism and Creativity*. doi:DOI: 10.19184/jtc.v4i1.14476
- Hardjono, & Raditya, R.Y. (2016). *Model Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa "Sejahtera" dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa.
- Kememparekraf. (2021, Agustus 18). *Tren Pariwisata Indonesia di Tengah Pandemi*. Diambil kembali dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: <https://kemparekraf.go.id/ragam-pariwisata/Tren-Pariwisata-Indonesia-di-Tengah-Pandemi>
- Pangaribowo, W. S. (2021, Agustus 4). *Industri Pariwisata di Jogja Rugi Rp 10 Triliun Selama Pandemi*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://travel.kompas.com/read/2021/08/04/123500027/industri-pariwisata-di-jogja-rugi-rp-10-triliun->

- selama-pandemi?page=all
- Raharja, D. T., & Anshori, H. A. (2021). *Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Desa/ Kampung Wisata di Indonesia*. Yogyakarta: Desa Wisata Institute.
- SIDA Bleberan. (2016, Oktober 16). *Sejarah Desa Bleberan*. Diambil kembali dari Kalurahan Bleberan: <https://www.bleberan-playen.desa.id/first/artikel/93>
- Sucahyo, N. (2021, Agustus 3). *Industri Pariwisata Yogyakarta Rugi Rp10 Triliun Selama Pandemi*. Diambil kembali dari VOA Indonesia: <https://www.voaindonesia.com/a/industri-pariwisata-yogyakarta-rugi-rp10-triliun-selama-pandemi/5988791.html>
- Sumarjono. (2017). *Pelebagaan Badan Usaha Milik Desa "Sejahtera" Dalam Pengembangan Desa Wisata di Bleberan, Kecamatan Playen, Kabupaten Gunungkidul*. Yogyakarta: Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa.
- Yuswohady. (2021). *Tren Industri Pariwisata 2021*. Jakarta: Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif.
- Yuwono, M. (2018, April 13). *Goa Rancang Kencana, Saksi Bisu Peradaban Manusia di Gunungkidul*. Diambil kembali dari Kompas.com: <https://travel.kompas.com/read/2018/04/13/193500127/goa-rancang-kencana-saksi-bisu-peradaban-manusia-di-gunungkidul>